



**PEMERINTAH KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**

RENCANA KERJA

**DINAS KOMINFO STATISTIK
PERSANDIAN**

2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja OPD merupakan penjabaran lebih lanjut maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini diantaranya disebutkan bahwa OPD menyusun Renja-OPD.

Sebelum Renja didefenisikan, diawali proses persiapan penyusunan Renja OPD. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Proses Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2020 dilakukan dengan mengacu pada RKPD, RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD. Sedangkan Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD yang disusun ke dalam Renja OPD, selaras dengan Renstra OPD. Penyusunan Renja OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dilakukan dengan proses tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan Renja SKPD;
- b. Penyusunan rancangan Renja SPD;
- c. Pelaksanaan forum SKPD;
- d. Penetapan Renja SKPD

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2019 berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2019-2020 serta memperhatikan

sasaran-sasaran yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020.

Selanjutnya Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2019 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2020.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE)

10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2020 dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya koordinasi dan integrasi yang sinergi baik antar unit kerja dalam OPD maupun luar lingkup OPD dan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan:

- a. Sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- b. Menjadi tolok ukur pengukuran kinerja dan pengevaluasian kinerja;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020 terbagi atas:

BAB I PENDAHULUAN.

Mengemukakan secara ringkas mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2020.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Mengemukakan informasi tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam bab ini dikemukakan hasil telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta rencana Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD di tujuikan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD, dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan program dan kegiatannnya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan pada laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018, evaluasi pelaksanaan Renstra, serta perkiraan pelaksanaan DPA tahun 2019. Telaah hasil evaluasi di maksud mencakup:

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan; dan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program kegiatan.

Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang direncanakan.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2020 menetapkan program dan kegiatan berupa:

1. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari 3 kegiatan:
 - a. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi Publik, Target 4 Jenis;
 - b. Pengelolaan Website Pemerintah Daerah, Target 28 Website;

- c. Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Pengaduan dan Aspirasi , Target 28 OPD;
- 2. Program Peningkatan Kualitas Data Statistik Daerah terdiri dari 3 kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Sistem Informasi Data dan Statistik Daerah, Target 1 Aplikasi;
 - b. Peningkatan Kualitas Penyajian Data dan Statistik Daerah, target 5 Jenis;
 - c. Pengelolaan, Updating, Analisis Data Statistik, target 20 Jenis;
- 3. Program Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Persandian, terdiri dari 4 kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Infrastruktur TIK, Target 34 Unit;
 - b. Pengembangan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Tugas dan Fungsi, Target 150 Orang;
 - c. Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi, target 4 Dokumen Pemantauan;
 - d. Pengembangan Tata Kelola Persandian, target 15 Unit;

Table 2.1 Realisasi Program/Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2018

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah				
1. Penyusunan Dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah Dokumen Data Yang Tersedia	28 Dokumen	28 Dokumen	100%
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				
1. Pengelolaan Sandi dan e-Government	Tercapainya Komunikasi dan Informasi Persandian dan Telekomunikasi	12 Bulan	12 Bulan	100%
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi				
1. Pelatihan SDM Dalam Bidang e-Government TIK	Jumlah Aparat Yang Menguasai Pemahaman Pesandian	2 Orang	2 Orang	100%
Program Kerjasama Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				
1. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Media Penyebaran Informasi	500 Exp Majalah, 500 Exp Kalender dan 15 Paket Baliho	500 Exp Majalah, 500 Exp Kalender dan 15 Paket Baliho	100%
2. Peliputan dan Penyebarluasan Informasi Publik	Frekuensi Peliputan dan Penyebaran Informasi Publik	192 Berita/120 Liputan	240 Berita/240 Liputan	125%
Program Pengembangan Sarana dan Deseminasi Informasi				
1. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah Peserta	260 Orang	260 Orang	100%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				
1. Pengawasan Menara Telekomunikasi	Jumlah Frekuensi Pemantauan Menara	12 Bulan	12 Bulan	100%

Dari 7 (Empat Tujuh) kegiatan tahun 2018 sebagaimana di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, Dengan Kegiatan :
 - a. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah, jumlah anggaran Rp. 254.512.000,- terealisasi Rp. 254.512.000,-, dengan persentase realisasi 100%.
2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan kegiatan :
 - a. Pengelolaan Sandi dan e-Government, Jumlah Anggaran Rp.204.771.500,- terealisasi Rp.204.721.500,- dengan persentase realisasi 99,97%.
3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan kegiatan :
 - a. Pelatihan SDM Dalam Bidang e-Government TIK, jumlah anggaran Rp.33.000.000,- terealisasi Rp. 32.999.900,-, dengan persentase realisasi 99,99%.
4. Program Kerjasama Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan :
 - a. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Jumlah anggaran Rp.216.440.000,- terealisasi Rp.216.439.010,- dengan persentase realisasi 99,99%.
 - b. Peliputan dan Penyebarluasan Informasi Publik, Jumlah anggaran Rp. 395.520.000,- terealisasi Rp. 395.348.762,- dengan persentase 99,95%
5. Program Pengembangan Sarana dan Desiminasi Informasi, dengan kegiatan :
 - a. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), jumlah anggaran Rp. 107.998.500,- terealisasi Rp.104.168.500,- dengan persentase realisasi 96,45%.
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan :

- a. Pengawasan Menara Telekomunikasi, jumlah anggaran Rp. 87.758.000,- terealisasi Rp.87.525.000,- dengan persentase realisasi 99,73%.

Capaian Renstra SKPD

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018

Nama SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019		Catatan
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Urusan Komunikasi dan Informatika										
	Bidang Urusan										
1 16 15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase Ketersediaan Data Statistik Daerah									
	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah Dokumen Data Yang Tersedia	4 Jenis	5 Jenis	28 Dokumen	28 Dokumen	100%	1 Jenis	1 Jenis	100%	Kominfo-SP
1 16 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Data Sandi dan Telekomunikasi									
	Pengelolaan Sandi dan e-Government	Tercapainya Komunikasi dan Informasi Persandian dan Telekomunikasi	0	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	0	0	0	Kominfo-SP
1 16 17	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Tersedianya Sandimen Ahli									
	Pelatihan SDM Dalam Bidang e-Government TIK	Jumlah Aparat Yang Menguasai Pemahaman Persandian	0	0	2 Orang	2 Orang	100%	0	0	0	Kominfo-SP
1 16 18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	Terlaksananya Penyebaran Informasi Melalui Media Cetak									
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Media Penyebaran Informasi	4 Jenis		500 Exp Majalah, 500 Exp Kalender, 15 Paket Baliho	500 Exp Majalah, 500 Exp Kalender, 15 Paket Baliho	100%		0	0	Kominfo-SP
	Peliputan dan Penyebarluasan Informasi Publik	Frekuensi Peliputan dan Penyebaran Informasi Publik	4 Jenis		192 Berita/ 120 Liputan	192 Berita/ 120 Liputan	100%		0	0	Kominfo-SP

1	16	22		Program Pengembangan Sarana dan Desiminasi Informasi	Meningkatnya Pemahaman Terhadap Kelompok Informasi Masyarakat									
				Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah Kelompok	0	0	80 Kelompok	80 Kelompok	100%	0	0	0	Kominfo-SP
1	16	25		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersedianya Data Jumlah Menara Komunikasi Yang Ada Di Polewali Mandar Yang Dapat Dijadikan Sumber Retribusi Dalam Rangka Peningkatan PAD Polewali Mandar									
				Pengawasan Menara Telekomunikasi	Jumlah Menara Yang Diawasi	125 Menara	113 Menara	25 Menara	97 Menara	388%	111	113	101%	Kominfo-SP

Polewali, 16 September 2019

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN,**



I NENGAH TRI SUMADANA, AP.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19760522 1994412 1 001

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Peraturan Daerah Kab. Polewali Mandar Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyebutkan Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas, adalah melaksanakan fungsi Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan Komunikasi dan Informatika, Statistik Serta Persandian;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Komunikasi dan Informatika, Statistik Serta Persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Tugas dan Fungsi setiap susunan organisasi Dinas dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar. Adapun tugas dan fungsi Satuan Kerja satu tingkat di bawah Kepala Dinas, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sekretariat Dinas

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :
 1. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
 2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
 3. penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
 4. penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
 5. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;

6. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
7. penyelenggaraan administrasi keuangan;
8. penyelenggaraan administrasi pelaporan;
9. penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;
10. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan informasi publik dan pengelolaan aspirasi publik .
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan petunjuk teknis pelayanan informasi publik dan pengelolaan aspirasi publik;
 2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelayanan informasi publik dan pengelolaan aspirasi publik;
 3. penyelenggaraan informasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
 4. penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media;
 5. penyelenggaraan pembinaan jasa usaha komunikasi dan informasi dan kegiatan operasional usaha komunikasi;
 6. penyelenggaraan pembinaan terhadap Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) milik Pemda maupun Non Pemda;
 7. penyelenggaraan penguatan sinergitas dan kemitraan pemerintah dengan media massa;
 8. penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik;
 9. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan informasi publik dan pengelolaan aspirasi publik; dan
 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Teknologi Informasi dan Persandian

- (1) Bidang Teknologi Informasi dan Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan teknologi informasi dan persandian.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Teknologi Informasi dan Persandian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengembangan teknologi informasi dan persandian;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan teknologi informasi dan persandian;
 - c. penyelenggaraan pengembangan e-government;
 - d. penyelenggaraan pengembangan sumber daya teknologi informasi dan persandian;
 - e. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
 - f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan teknologi informasi dan persandian; dan
 - a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- d. Bidang Statistik
 - (1) Bidang Statistik mempunyai tugas menyelenggarakan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan statistik Sektoral Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan statistik sektoral Pemerintah Daerah;
 - c. penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data sektoral sesuai kebutuhan dan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. penyelenggaraan dokumentasi statistik hasil-hasil pembangunan daerah;
 - e. penyelenggaraan visualisasi statistik pemerintah daerah;
 - f. penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan statistik;
 - g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan statistik Sektoral Pemerintah Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas dimaksud, beberapa indikator dapat digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan OPD antara lain : Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah, Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, Peliputan dan penyebarluasan informasi public, Pembinaan kelompok informasi masyarakat serta pengawasan menara

telekomunikasi. Analisis kinerja pelayanan SKPD dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Cakupan Layanan Akses Informasi

Cakupan Layanan Akses Informasi ditargetkan 100% pada tahun 2018, dan terealisasi 100%.

b. Jumlah Operator Telepon Seluler

Jumlah Operator Telepon Seluler ditargetkan 9 Operator pada tahun 2018, dan terealisasi 9 Operator (100%).

c. Persentase Penyebaran Informasi Melalui Media Massa :

- Majalah : Target 50%, Realisasi 50%.
- Radio : Target 100%, Realisasi 100%.
- TV Kabel : Target 100%, Realisasi 100%.

d. Persentase Penyebaran Informasi Melalui Media Online

Persentase Penyebaran Informasi Melalui Media Online ditargetkan 100% pada tahun 2018, dan terealisasi 100%.

e. Persentase Penyebaran Informasi Melalui Media Tradisional

Persentase Penyebaran Informasi Melalui Media Tradisional ditargetkan 50% pada tahun 2018, dan terealisasi 50%.

f. Persentase Penyebaran Informasi Melalui Media Interpersonal

Persentase Penyebaran Informasi Melalui Media Interpersonal ditargetkan 50% pada tahun 2018, dan terealisasi 50%.

g. Ketersediaan Website Milik Pemda :

- Website Resmi Pemda Sebagai Domain : Target 1 Web, Realisasi 1 Web.
- Website SKPD Sebagai Sub Domain : Target 27 Web, Realisasi 15 Web (55%).

h. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat

Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat ditargetkan 80 Kelompok pada tahun 2018, dan terealisasi 80 Kelompok.

2. Urusan Statistik

a. Persentase Ketersediaan Dokumen Statistik Daerah

Target 2018 100%, Realisasi 50%.

3. Urusan Persandian

a. Tercapainya Pelayanan Sandi dan Telekomunikasi

Target 2018 100%, Realisasi 50%.

b. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Target 2018 100%, Realisasi 50%.

c. Tersedianya Layanan Informasi Hotspot Free

Target 2018 3 Titik, Realisasi 3 Titik (100%).

d. Jumlah Menara/Tower Komunikasi Yang Diawasi Selama Satu Tahun

Target 2018 25 Tower, Realisasi 97 Tower (388%).

e. Tersedianya Sandiman Ahli

Target 2018 2 Orang, Realisasi 2 Orang

f. Jumlah Layanan Mobil PLIK

Target 2018 48 Layanan, Realisasi 0 Layanan (0%)

g. Tersedianya Siaran Radio Tipalayo

Target 2018 100%, Realisasi 100%.

Secara umum dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada tahun 2018 dapat mencapai target, sesuai dengan yang telah direncanakan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar untuk perencanaan jangka menengah daerah kurun 2019-2024 diidentifikasi melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut bidang, analisis lingkungan strategis kemudian dihasilkan daftar isu strategis sebagai berikut :

- a. Belum tersedianya regulasi/kebijakan daerah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian, serta Bidang Statistik.
- b. Belum optimalnya pelayanan komunikasi dan informasi perangkat daerah
- c. Belum optimalnya pelayanan e-government
- d. Belum optimalnya perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah.
- e. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Persandian pada Perangkat Daerah.
- f. Standar baku statistik sektoral skala kabupaten.
- g. Tata kelola statistik sektoral skala kabupaten.
- h. Pengembangan Sistem Satu Data.

- i. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Persandian pada Perangkat Daerah.
- j. Standar baku statistik sektoral skala kabupaten.
- k. Tata kelola statistik sektoral skala kabupaten.
- l. Pengembangan Sistem Satu Data.

2.3.3 Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

a. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Masalah pokok pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Masih Rendah disebabkan oleh:

- Kurangnya publikasi kegiatan perangkat daerah kerjasama dengan Kominfo. Hal tersebut dipengaruhi oleh belum terbangunnya standar prosedur layanan publikasi kegiatan perangkat daerah, serta belum optimalnya koordinasi dan kerjasama publikasi dengan perangkat daerah.
- Peranan PPID perangkat daerah belum optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman PPID, belum adanya monitoring dan evaluasi PPID perangkat daerah, serta Kurangnya ketersediaan data dan informasi.
- Belum tertibnya pengelolaan website perangkat daerah. Ini terjadi karena admin website perangkat daerah di Kabupaten Polewali Mandar belum memadai, demikian juga akses internet pada perangkat daerah yang masih terbatas serta kurangnya ketersediaan data dan informasi.
- Belum optimalnya implementasi LAPOR di lingkungan perangkat daerah. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pemahaman jajaran pimpinan perangkat daerah terhadap pengelolaan LAPOR, belum berfungsinya admin LAPOR perangkat daerah serta kurangnya sosialisasi ke masyarakat untuk pemanfaatan LAPOR.

b. Bidang Teknologi Informasi dan Persandian

Masalah Pokok pada Bidang Teknologi Informasi dan Persandian adalah Kualitas Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian Belum memadai ini disebabkan oleh :

- Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum memadai, disebabkan belum terbitnya kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Tata kelola SPBE yang belum memadai disebabkan belum tersusunnya tata kelola SPBE. Hal ini disebabkan belum optimalnya pemahaman perangkat daerah tentang kebijakan SPBE, dan belum terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi tata kelola SPBE perangkat daerah, serta belum optimalnya kapasitas akses internet perangkat daerah.
- Tidak optimalnya pengembangan aplikasi pemerintahan berbasis fungsi, disebabkan karena belum tersusunnya analisis kebutuhan aplikasi pemerintahan, dan belum optimalnya pendampingan pengembangan aplikasi pemerintahan berbasis fungsi.
- Pengembangan pengamanan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah belum optimal, disebabkan belum tersedianya kebijakan keamanan informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah, dan belum tersedianya SDM persandian yang memadai, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi keamanan informasi dan komunikasi

c. Bidang Statistik

Masalah Pokok yang dihadapi Bidang Statistik adalah Kualitas Data Statistik Daerah Belum Memadai. Hal ini disebabkan belum optimalnya tata kelola data sektoral, karena belum tersedia kebijakan pengelolaan data sektoral, belum tersedianya aplikasi pengelolaan data sektoral, belum terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan data sektoral, serta belum optimalnya kualitas penyajian data statistik daerah.

Factor-faktor sebagaimana di atas berpengaruh besar terhadap kinerja Dinas yang terus menerus harus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan masyarakat.

2.3.4 Tantangan dan peluang.

2.4.1. Tantangan

a. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Masih minimnya pemahaman masyarakat dalam hal bijak menggunakan sosial media,

2. Belum maksimalnya Pengelolaan Website Pemerintah Daerah dan website Perangkat Daerah;
 3. Masih kurangnya pemahaman OPD terhadap pengelolaan informasi publik,
 4. Belum maksimalnya peranan PPID Perangkat daerah pada disetiap OPD,
 5. Belum optimalnya implementasi LAPOR di lingkungan perangkat daerah;
 6. Belum adanya kebijakan Tata Kelola Persandian dan Pengelolaan SPBE,
 7. Layanan terwujudnya Aplikasi OPD yang terintegrasi,
 8. belum tersedianya Infrastruktur penunjang dalam pelaksanaan e-Government
- b. Bidang Urusan Statistik
1. Kualitas data statistik yang belumsesuai standar baku mempengaruhi data yang dihasilkan dan berakibat pada kebijakan pemerintah daerah dan swasta dalam membuat perencanaan dan berdampak pada program pembangunan di pemerintahan daerah.
 2. Masih kurangnya ketersediaan data untuk memenuhi indikator kewenangan kabupaten dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 3. Rendahnya tata kelola data administrasi dalam mendukung penyediaan data statistik di pemerintah daerah utamanya data statistik sektoral.
 4. Penguasaan TIK yang semakin berkembang pesat belum mampu menjamin peningkatan kualitas data secara keseluruhan melalui sistem tata kelola data yang terintegrasi.
- c. Bidang Urusan Persandian
1. Fungsi persandian dalam menjamin keamanan e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mendukung terciptanya keamanan informasi belum terlaksana secara efektif dan efisien,
 2. Terbatasnya tenaga persandian dan pengelola keamanan informasi.

2.4.2. Peluang

- a. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika
1. Pengelolaan Website Pemda seluruh OPD dapat dijangkau dengan akses internet yang memadai,
 2. Masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan saran dan kritikan kepada pemerintah melalui aplikasi LAPOR.

3. Kominfo menjadi wadah penyedia layanan informasi yang terpercaya.
 4. Perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal.
 5. Tersedianya regulasi termasuk monitoring evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- b. Bidang Urusan Statistik
1. Permintaan terhadap data statistik semakin meningkat baik data mikro maupun makro.
 2. Perkembangan lingkungan strategis yang cepat sehingga persoalan data statistik bukan hanya kebutuhan nasional, tetapi menjadi kebutuhan regional dan internasional.
- c. Bidang Urusan Persandian
1. Teknologi kemandirian informasi semakin berkembang
 2. Dukungan BSSN termasuk BSRE dalam penguatan kemandirian informasi di daerah.

2.3.5 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Sesuai kewenangan dan tupoksinya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kab. Polewali Mandar Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar berupaya melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang menjembatani Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagai komunikator untuk menyampaikan pesan berupa Program/Kegiatan yang ada pada masing-masing OPD kepada masyarakat Kabupaten Polewali Mandar, pengembangan pemanfaatan teknologi informasi, penyediaan data sektoral kewilayahan dan menjaga keamanan informasi di Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Upaya untuk menyebarluaskan pesan dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dilakukan melalui berbagai cara diantaranya dengan melakukan kegiatan publikasi mengenai aktifitas pembangunan dan kebijakan yang berlangsung di Kabupaten Polewali Mandar, mengelola layanan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan, serta membangun kerjasama dengan media massa baik cetak, elektronik, maupun online melalui Jumpa Pers. Pengembangan teknologi informasi dilakukan dengan berbagai penyempurnaan sistem informasi guna mendukung pelaksanaan

Pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar , penyediaan data sektoral dan memperkuat jaring pengaman persandian.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi yang berkembang dengan sangat pesat maka dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar, mempertimbangkan dan melihat isu-isu strategis yang ada antara lain :

1) Rendahnya kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Hingga saat ini, kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten Polewali Mandar masih berada dalam kategori Rendah. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, sebagai berikut :

- a. Tata kelola pengelolaan informasi publik belum terlaksana secara memadai yang terlihat dari belum adanya Daftar Informasi Publik yang diformalkan, tidak berfungsinya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu, Website Pemerintah Daerah dan Website Perangkat Daerah tidak memenuhi standar, tidak lengkap, tidak update dan sebagian besar belum link dengan www.polmankab.go.id serta sistem operasional prosedur pelayanan informasi dan dokumentasi belum tersedia dan diformalkan.
- b. Belum optimalnya implementasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat(LAPOR). Hingga saat ini, seluruh aduan dan aspirasi masyarakat belum diproses sesuai sistem prosedur pelayanan LAPOR serta belum ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang terkait. Hal ini disebabkan oleh belum terbentuknya Admin LAPOR Kabupaten, Admin LAPOR di tingkat Perangkat Daerah sebagai pejabat penghubung, serta belum optimalnya pemahaman Perangkat Daerah terkait pengelolaan LAPOR.
- c. Kurangnya publikasi kegiatan perangkat daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari kurangnya publikasi kegiatan perangkat daerah pada masing-masing web dan kurangnya permintaan peliputan Dinas dari perangkat daerah. Hal ini dipengaruhi oleh belum terbangunnya standar dan sistem prosedur layanan peliputan dan publikasi kegiatan

perangkat daerah dan belum optimalnya koordinasi dan kerjasama publikasi dengan perangkat daerah. Disisi lain media publikasi yang dapat dijangkau oleh Dinas hanya memanfaatkan Media Sosial dan Media Majalah Warta KominfoSP yang cakupan akses masyarakat terhadap informasi public tersebut terbatas pada masyarakat pengguna media sosial.

2) Rendahnya kualitas pemanfaatan teknologi Informasi dan persandian daerah.

Hingga saat ini, cakupan fungsi-fungsi utama pemerintahan yang berbasis teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian hanya sebesar 32%. Sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi tersebut, antara lain :

- a. Belum adanya kebijakan Daerah terkait Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Arsitektur SPBE, Proses Bisnis SPBE, Infrastruktur SPBE, Data Center, pemanfaatan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus serta Keamanan SPBE;
- b. Belum tersedianya Data Center sebagai fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan data dan pemulihan data.
- c. Belum memadainya kapasitas bandwidth perangkat daerah sehingga kecepatan akses dan pengiriman data tidak maksimal
- d. Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang ada dan digunakan Perangkat Daerah saat ini belum terpadu dan belum memenuhi standar dan masih berada di level 2 (dua) baik dari aspek kematangan kapabilitas proses yang berada pada level terkelola maupun kematangan pada kapabilitas fungsi yang berada pada level interaksi.
- e. Pemerintah Daerah belum menerapkan keamanan informasi yang memadai sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

3) Rendahnya kualitas Data Sektoral

Hingga saat ini data-data sektoral yang dianggap valid dan memadai adalah data-data yang tersedia pada Polewali Mandar Dalam Angka yang dikeluarkan oleh BPS, namun data ini hanya menyajikan keadaan 1 (satu)

tahun sebelumnya, sehingga dari aspek kekinian masih dianggap belum *update*. Perangkat Daerah belum mengelola data sektoral dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data yang dibutuhkan belum dapat disediakan dalam waktu singkat, data belum dapat diakses secara luas dan mudah, data belum terstandarisasi, metadata belum tersedia, dan interoperabilitas data belum terbangun. Kondisi ini disebabkan oleh sejumlah faktor, sebagai berikut :

- a. belum adanya kebijakan pengelolaan data sektoral;
- b. belum terbangunnya tata kelola data sektoral;
- c. Belum adanya forum koordinasi data;
- d. belum tersedianyasistem informasi data yang terpadu dan terintegrasi;
dan
- e. belum terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan data sektoral.

2. 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar disusun dengan memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang telah disusun kemudian disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian melalui pelaksanaan berbagai kegiatan antara lain, kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi Publik, Pengelolaan Website Pemerintah Daerah, Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi, Pengembangan Infrastruktur TIK, Pengembangan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Tugas dan Fungsi, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi, Pengembangan Tata Kelola Persandian Pengembangan Sistem Informasi Data dan Statistik Daerah, serta kegiatan Pengelolaan, Updating, Analisis Data Statistik.

Berkaitan dengan hal tersebut, di dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020, ketiga Program mendapat prioritas serta program dan kegiatan yang ditujukan untuk terselenggaranya ketiga program dimaksud telah merupakan bagian dari rencana kerja pemerintah daerah. Dalam RKPD tahun 2020 tercantum program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan kegiatan;
 - a. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi Publik;
 - b. Pengelolaan Website Pemerintah Daerah;
 - c. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi;
2. Program Peningkatan Kualitas Data Statistik Daerah, dengan kegiatan :
 - a. Pengembangan Sistem Informasi Data dan Statistik Daerah;
 - b. Peningkatan Kualitas Penyajian Data dan Statistik Daerah;
 - c. Pengelolaan, Updating, Analisa Data Statistik;
3. Program Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Persandian, dengan kegiatan:
 - a. Pengembangan Infrastruktur TIK;
 - b. Pengembangan Aplikasi Pemeliharaan Berbasis Tugas dan Fungsi;
 - c. Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi;
 - d. Pengembangan Tata Kelola Persandian;

Program dan kegiatan sebagaimana di atas mencerminkan adanya upaya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka menjawab perubahan di tengah masyarakat dan lingkup OPD..

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil Musrenbang mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu- isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan penganggaran sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan hasil musrenbang Kecamatan. Untuk tahun 2020, berdasarkan hasil musrenbang 2019 , tidak ada usulan masyarakat yang diakomodir oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Polewali Mandar.

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Rensta K/L dan Renstra

Pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, diketahui bahwa sasaran jangka menengah yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah Komunikasi dan Informatika yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebagai berikut :

- a. Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia;
- b. Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia;

Pencapaian sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika pada level Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, akan dipengaruhi sejumlah faktor, baik yang bersifat menghambat maupun mendorong. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain :

Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
a. Tata kelola pengelolaan informasi publik belum terlaksana secara memadai;	a. Adanya Kebijakan Reformasi Birokrasi yang diikuti dengan monitoring, evaluasi, dan penilaian oleh Kementerian PAN dan RB;
b. Belum optimalnya implementasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR);	b. Adanya Kebijakan SPBE yang diikuti dengan monitoring, evaluasi, dan penilaian oleh
c. Kurangnya publikasi kegiatan perangkat daerah sebagai bagian	

<p>dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah</p> <p>d. Belum adanya kebijakan terkait SPBE</p> <p>e. Belum tersedianya Data Center</p> <p>f. Belum memadainya kapasitas bandwidth perangkat daerah</p> <p>g. Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang ada dan digunakan Perangkat Daerah saat ini belum terpadu dan belum memenuhi standar</p> <p>h. Masih tingginya cakupan area blankspot di Kabupaten Polewali Mandar</p>	<p>Kementerian PAN dan RB;</p> <p>c. Adanya Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik yang diikuti dengan monitoring, evaluasi, dan penilaian oleh Kementerian PAN dan RB, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Komisi Informasi Propinsi Sulawesi Barat dan Ombudsman RI Sulawesi Barat;</p> <p>d. Adanya fasilitasi penguatan akses internet pada Sekolah, Puskesmas, unit-unit pelayanan termasuk desa-desa yang tergolong 3 T (Terpencil, Terluar dan Tertinggal) oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo;</p> <p>e. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang dapat mempercepat peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik</p>
---	--

Pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara tahun 2018-2019, maka diuraikan sasaran jangka menengah yang terkait dengan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah bidang Persandian sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya Keamanan Siber secara Andal, Profesional dan Terpercaya
- b. Terselenggaranya Pendayagunaan Kapabilitas Identifikasi dan Deteksi yang Andal
- c. Terselenggaranya Pengembangan Kapabilitas Proteksi yang Optimal
- d. Terselenggaranya Pendayagunaan Kapabilitas Penanggulangan dan Pemulihan yang Kapabel
- e. Terselenggaranya Pendayagunaan Kapabilitas Pemantauan dan Pengendalian yang Profesional

Memperhatikan sasaran jangka menengah yang tertuang dalam Renstra BSSN tersebut, maka faktor penghambat dan pendorong yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran tersebut antara lain :

Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
a. Pemerintah Daerah belum menerapkan keamanan informasi dengan baik; b. Terbatasnya sumber daya aparatur yang dapat melakukan pengelolaan keamanan informasi; c. Belum tersedianya infrastruktur keamanan informasi yang memadai di daerah;	a. Adanya Kebijakan SPBE yang diikuti dengan monitoring, evaluasi, dan penilaian oleh Kementerian PAN dan RB b. Adanya Kebijakan Satu Data Indonesia; c. Adanya fasilitasi penguatan keamanan Informasi oleh BSSN termasuk BSRE;

Selanjutnya mencermati Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, maka sasaran jangka menengah BPS yang berkaitan langsung dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan statistik, antara lain :

- Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional
- Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional
- Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*)

Dengan demikian sejumlah faktor penghambat maupun faktor pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran menengah BPS tersebut adalah :

Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
a. belum adanya kebijakan pengelolaan data sektoral; b. belum terbangunnya tata kelola data sektoral; c. Belum adanya forum koordinasi data; d. belum tersedianya sistem informasi data yang terpadu dan terintegrasi; e. belum terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan data sektoral	a. Adanya Kebijakan Satu Data Indonesia; b. Terjalinnnya kerjasama yang baik dalam pemanfaatan Data BPS;

3.1.1. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil review terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Komunikasi, Informatika, Renstra BSSN, Renstra Badan Pusat Statistik, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, dan implikasi KHLS bagi pelayanan perangkat daerah, dirumuskan isu strategis dalam pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar, sebagai berikut :

1) Keterbukaan Informasi Publik

Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat;

2) akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi

Masih tingginya cakupan area blankspot terkait akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi utamanya internet cukup berpengaruh bagi upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi pada wilayah area blankspot dimaksud.

3) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peningkatan kualitas tata kelola SPBE yang meliputi : arsitektur SPBE pemerintah daerah, Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Anggaran SPBE Pemerintah Daerah, Proses Bisnis, Data dan Informasi,

Infrastruktur SPBE, Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE yang meliputi layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik.

4) Satu Data

Untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data berupa pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan Data Induk.

5) Keamanan Informasi

Keamanan Informasi mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE. Oleh karenanya perlu terwujud keamanan Siber secara Andal, Profesional dan Terpercaya melalui pendayagunaan kapabilitas identifikasi dan deteksi yang andal, terselenggaranya pengembangan kapabilitas proteksi yang optimal, terselenggaranya pendayagunaan kapabilitas penanggulangan dan pemulihan yang kapabel dan terselenggaranya pendayagunaan kapabilitas pemantauan dan pengendalian yang professional.

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan:
Untuk mencapai tujuan di atas maka ditetapkan sasaran berupa:
 1. Meningkatkan kualitas Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Meningkatkan Kualitas Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian;
 3. Meningkatkan Kualitas Data Statistik Daerah;
 4. Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran;

5. Meningkatnya Akuntabilitas Satuan Kerja;
6. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;

3.4. Program dan Kegiatan

Dengan kedudukan Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif. Disamping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Disisi lain, posisi kegiatan dalam rangkaian pencapaian ini adalah berada pada bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud indikator kinerja yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan. Maka pertimbangan utama dalam perumusan program dan kegiatan Dinas adalah untuk pencapaian visi **“Polewali Mandar Maju dan Sejahtera”** yang secara khusus program dan kegiatan dimaksud berada pada misi “Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Modern”

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 2.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Polewali Mandar

Nama OPD : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1	15		Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Perangkat Daerah Yang Informatif dan Komunikatif	Kominfo-SP Kab. Polman	51%	329,000,000	APBD		58%	340,000,000
1	1	15	1	Peningkatan Kualitas Informasi Publik	Jumlah Jenis Media Penyebarluasan Informasi Publik	Kominfo-SP	4 Jenis	220,000,000	APBD		5 Jenis	227,000,000
1	1	15	1	Pengelolaan Website Pemerintah Daerah	Jumlah Website Terkelola Dengan Baik (Link,Lengkap,Update,Valid)	Kominfo-SP	28 Web	64,000,000	APBD		38 Web	67,100,000
1	1	15	1	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pegaduan dan Aspirasi	Jumlah OPD Yang Aktif Memanfaatkan Aplikasi LAPOR!	Kominfo-SP	28 OPD	45,000,000	APBD		40 OPD	45,000,000
1	1	15		Program Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Teknonologi Informasi dan Persandian	Persentase Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kominfo-SP Kab. Polman	38 %	1,037,000,000	APBD		45 %	1,071,000,000
1	1	15	2	Pengembangan Infrastruktur TIK	Jumlah PDYang Memperoleh Layanan Akses Internet Fiber Optic 20 MBPS Ke Atas	Kab. Polman	34 OPD	930,000,000	APBD		38 OPD	950,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1	15	3	Pengembangan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Tugas dan Fungsi	Jumlah Fungsi Utama PD Yang Didukung Teknologi Sistem Informasi	Kab. Polman	30 Fungsi	60,000,000	APBD		35 Fungsi	65,000,000
1	1	15	4	Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	Jumlah Menara Yang Diawasi	Kab. Polman	125 Menara	15,000,000	APBD		128 Menara	19,000,000
1	1	15	5	Pengembangan Tata Kelola Persandian	Jumlah OPD Yang Telah Melakukan Pengamanan Data dan Informasi Elektronik	Kab. Polman	15 OPD	32,000,000	APBD		25 OPD	37,000,000
1	1	15		Program Peningkatan Kualitas Data Statistik Daerah	Persentase Data Sektoral Yang Valid	Kominfo-SP Kab. Polman	50%	193,000,000	APBD		64%	200,000,000
1	1	15	1	Pengembangan Sistem Informasi Data dan Statistik Daerah	Jumlah Aplikasi Data Online	Kab. Polman	1 Jenis	115,000,000	APBD		1 Jenis	118,000,000
1	1	15	2	Peningkatan Kualitas Penyajian Data dan Statistik Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Data Sektoral	Kab. Polman	5 Jenis	53,000,000	APBD		5 Jenis	56,000,000
3	03	36	05	Pengelolaan, Updating, Analisis Data Statistik	Jumlah Jenis Data Sektoral Yang Terupdate	Kab. Polman	20 Jenis	25,000,000	APBD		30 Jenis	30,000,000
1	1	2		Program Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/Stake holder	Kominfo-SP	98%	328,550,000	APBD		98%	385,300,000
1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar Yang Terkelola	Kominfo-SP	1000 Surat	19,000,000	APBD		1000 surat	21,000,000
1	1	2	3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Kominfo-SP	1 Jenis	35,000,000	APBD		1 Jenis	39,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					dan Listrik							
1	1	3	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Dilengkapi Surat Izin	Kominfo-SP	6 Unit	11,000,000	APBD		6 Unit	11,000,000
1	1	3	6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jenis Jasa Kebersihan Kantor	Kominfo-SP	2 Jenis	20,000,000	APBD		2 Jenis	21,000,000
1	1	3	7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	Kominfo-SP	28 jenis	12,550,000	APBD		28 Jenis	15,000,000
1	1	3	8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Kominfo-SP	2 Jenis	7,000,000	APBD		2 Jenis	8,000,000
1	1	3	9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	Kominfo-SP	10 Jenis	2,500,000	APBD		-	-
1	1	3	9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan minum yang tersedia	Kominfo-SP	2 Jenis	12,000,000	APBD		2 Jenis	13,000,000
1	1	3	12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah SPPD Luar Daerah	Kominfo-SP	32 SPPD	50,000,000	APBD		35 SPPD	55,000,000
1	1	3	13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah SPPD Kedalam Daerah	Kominfo-SP	27 SPPD	7,000,000	APBD		35 SPPD	17,000,000
1	1	3	19	Pengadaan Meubeleur	Jumlah Jenis Meubeleur	Kominfo-SP	4 Jenis	17,000,000	APBD		4 Jenis	19.000.000
1	1	3	20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kominfo-SP	1 Jenis	-	APBD		1 Jenis	-
1	1	3	21	Pengadaan Komputer PC/Notebook dan Kelengkapannya	Jumlah Unit Komputer PC/Notebook	Kominfo-SP	2 Unit	19,500,000	APBD		52 Unit	21,725,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1	3	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas Bangunan dan Halaman Kantor Yang Terpelihara	Kominfo-SP	1757 M ²	9,000,000	APBD		1757 M ²	11,000,000
1	1	3	25	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang terlihara	Kominfo-SP	6 Unit	8,000,000	APBD		6 Unit	11,000,000
1	1	3	27	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah unit Peralatan gedung Kantor Yang terpelihara	Kominfo-SP	2 Jenis	9,000,000	APBD		2 Jenis	9,000,000
1	1	3	30	Pengelolaan Informasi, Pengaduan dan Aspirasi Publik	Jumlah Jenis Layanan Yang Terkelola	Kominfo-SP	3 Jenis	7,000,000			3 Jenis	7,350,000
1	1	3	31	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Tersedia	Kominfo-SP	2 Jenis	10,000,000	APBD		2 Jenis	11,000,000
1	1	3	33	Pendidikan, Pelatihan dan Bimbingan Teknis	Jumlah Pegawai Yang Menyelesaikan Pendidikan, Pelatihan dan Bimbingan teknis	Kominfo-SP	3 Orang	15,000,000	APBD		4 Orang	15,500,000
1	1	3	34	Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian Yang Terkelola Dengan Tertib	Kominfo-SP	4 Jenis	9,000,000	APBD		4 Jenis	9,450,000
1	1	3	35	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Jenis bahan bacaan Peraturan Perundang- undangan	Kominfo-SP	2 Jenis	3,000,000	APBD		3 Jenis	3,500,000
1	1	3	41	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara	Kominfo-SP	I Unit	23,000,000	APBD		1 Unit	27,255,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1	3	44	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jenis Perbaikan Peralatan Kantor	Kominfo-SP	2 Jenis	9,000,000	APBD		2 Jenis	9,500,000
1	3	1		Program Penguatan Kualitas Perencanaan , Pengendalian dan Pelaporan	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Kominfo-SP	B	28,289,000	APBD		BB	28,099,000
1	3	1	2	Penyusunan Renja/Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Yang Tersusun Sesuai Standard an Tepat Waktu	Kominfo-SP	1 Dokumen	7,000,000	APBD		1 Dokumen	7,000,000
1	3	1	3	Penyusunan RKA-DPA/RPKA-DPPA	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Standard an Tepat Waktu	Kominfo-SP	4 Dokumen	7,000,000	APBD		4 Dokumen	6,000,000
1	3	1	4	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Yang Tersusun Sesuai Standard an Tepat Waktu	Kominfo-SP	4 Dokumen	6,000,000	APBD		4 Dokumen	6,000,000
1	3	1	5	Penyusunan Pelaoran Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akuntabilitandasi s Kinerja Perangkat daerah Yang Tersusun Sesuai Standard an Tepat Waktu	Kominfo-SP	1 Dokumen	3,289,000	APBD		1 Dokumen	3,099,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	3	1	6	Penyusunan Laporan Kinerja dan LPPD	Jumlah LPPD dan Laporan Pertanggungjawab an Bupati Pada Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Standard an Tepat Waktu	Kominfo-SP	1 Dokumen	5,000,000	APBD		1 Dokumen	6,000,000
1	4	1		Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	Kominfo-SP	WTP	12,881,000	APBD		WTP	13,244,000
1	4	1	1	Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah SPM Yang Diterbitkan	Kominfo-SP	300 Dokumen	3,500,000	APBD		300 Dokumen	4,500,000
1	4	1	2	Penyusunan Laporan Keuangan Berkala(Bulanan,Triwulan dan Semesteran)	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Berkala Sesuai Standard an Tepat Waktu	Kominfo-SP	18 Dokumen	4,500,000	APBD		18 Dokumen	3,700,000
1	4	1	3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SEsuai Standard an Tepat Waktu	Kominfo-SP	1 Laporan	2,055,000	APBD		1 Laporan	2,500,000
1	4	1	4	Penataan Administrasi Barang/Aset Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Dokumen Barang Milik Daerah Yang Tersusun Sesuai Standard an Tepat Waktu	Kominfo-SP	1 Dokumen	2,826,000	APBD		1 Dokumen	2,544,000
JUMLAH								1,037,000,000			1,071,000,000	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Polewali Mandar Tahun 2020 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh staf Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yang Dalam setiap Pelaksanaannya tersebut senantiasa memperhatikan factor efektifitas, efisiensi, serta kerjasama antar bidang agar tujuan dan sasaran Renja dapat tercapai. Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2020.

Polewali, 16 September 2020

KEPALA DINAS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN



I Nengah Tri Sumadana, AP.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19760522 199412 1 001